KEMERDEKAAN, PERJUANGAN BELUM USAI

LPM Situs





Buletin LPM Situs Edisi Agustus-September 2021



Edisi buletin kali ini sungguh unik. Karena terdapat dua tema yang digabungkan menjadi satu,yakni tentang kemerdekaan dan perjuangan, sesuai bulan yang ada di agustus dan september. Di bulan Agustus, secara historis, kita akan mendapatkan suasana yang memicu semangat kemerdekaan kita, sedangkan di bulan September, kita akan merasakan historis yang kelam dan penuh misteri. Saya harap dengan adanya buletin edisi Agustus-September ini dapat merefleksikan rasa kemerdekaan, perjuangan, maupun renungan kondisi saat ini yang tak lepas dari keadaan historis kita.

SUSUNAN REDAKSI

Buletin Edisi Agustus-September

PEMBINA
Edy Budi Santoso S.S., M.A.

PEMIMPIN UMUM
MA. Fauzan Al Riyadh Panjaitan

PEMIMPIN REDAKSI
Winda Larasati

PENANGGUNG JAWAB
Salsha Okta Fairuz

EDITOR
Cane Rahayu
Tanjung Tani
Winda Larasati

LAYOUTER
Alfi M F
Duwi Rachmawati
Elsa Ayu F
Izzatin Nada Al Jannah

REPORTER
Cane Rahayu
MA. Fauzan Al Riyadh Panjaitan
Salsha Okta Fairuz
Tanjung Tani

KONTRIBUTOR
Alfian Widi Santoso
Ardino
Dini Artaviana
Moch. Fachri
Moch. Zidane Indrawan
Salsha Okta Fairuz
Tanjung Tani

DAFTAR ISI

1

1. Gerakan 30 September Ala KPK, 57 Pegawai Diberhentikan
(Penulis: Salsha Okta Fairuz)

2. Webinar BEM FIB Unair, Merefleksikan Kemerdekaan Budaya Jawa Timur Masa Kini dan Dampaknya di Masa Pandemi
(Penulis: MA. Fauzan Al Riyadh Panjaitan)

3. Hati-Hati! Gilang Bungkus Kembali Sasar Maba dari Penjara
(Penulis: Salsha Okta Fairuz)

4. Waspada! Aksi Penipuan Mengatasnamakan Pimpinan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Beredar di Kalangan Mahasiswa
(Penulis: Cane Rahayu)

5. Semester Baru, Kurikulum Baru!
(Penulis: Tanjung Tani)

2

6. Di Mana Kata Merdeka Bagi Para Korban Kekerasan Seksual?
(Penulis: Salsha Okta Fairuz)

7. Belajar Dari Sirius Black : "Apa Sejatinya Bila Hidup Tanpa Risiko?"
(Penulis: Dini Artaviana)

3

8. Puisi "Siapa yang Ingin Jadi Polisi?"
(Penulis: Alfian Widi Santoso)

9. Puisi "Hitam, Sengit Dengan Oligarki"
(Penulis: Ardino)

4

10. Bagaimana Perjuangan Indonesia Pasca Kemerdekaan?
(Penulis: Tanjung Tani)

5

11.Submissions
(6 Foto Meme)

Upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Gerakan 30 September Ala KPK, 57 Pegawai Diberhentikan



Pada 30 September 2021 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memberhentikan 57 pegawainya yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Sejumlah 57 pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui Berita Acara Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan dalam rangka pengalihan pegawai KPK Menjadi ASN yang beredar pada tanggal 25 Mei 2021, terdapat sekitar 75 pegawai KPK yang diberitahukan akan diberhentikan. 24 pegawai diantaranya dianggap masih bisa dilatih dengan mengikuti pelatihan bela negara, sedangkan 51 pegawai KPK lainnya dianggap tidak bisa dilatih karena sudah mendapat 'nilai merah' untuk nilai TWK-nya. Dokumen berita acara tersebut juga sudah ditandatangani oleh 5 pimpinan KPK, diantaranya: Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Lili Pintauli Sirgear, dan Nawawi Pomolango hingga MenPAN -RB Tjahjo Kunolo, Menkumham Yasonna Laoly, dan Ketua KASN Agus Pramusinto.

Dari 24 pegawai yang disarankan mengikuti pelatihan bela negara, terdapat 6 pegawai yang memilih untuk tidak mengikuti pelatihan tersebut. Sehingga, secara resmi KPK mengumumkan bahwa jumlah pegawai KPK yang diberhentikan sebanyak 57 orang.

"Terhadap 6 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan, namun tidak mengikutinya. Sehingga mereka tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September 2021," ucap Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada hari Rabu (15/09).

Diantara pegawai KPK yang tidak lolos TWK dan secara resmi diberhentikan, terdapat nama-nama penyidik senior KPK, seperti Novel Baswedan hingga Harun Al Rasyid yang terkenal dengan julukan 'Raja OTT KPK'. Lakso Anindito atau penyidik KPK pada kasus korupsi bantuan sosial (bansos) mantan Menteri Sosial Juliari Batubara juga dikabarkan diberhentikan karena tidak lolos tes tersebut.

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret-9 April 2021 ini juga sempat membuat polemik di masyarakat. Pasalnya, soal yang terdapat pada tes tersebut dianggap jauh dari konteks wawasan kebangsaan itu sendiri. Eks juru bicara KPK, Febri Diansyah sempat membeberkan salah satu contoh pertanyaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) melalui akun *Twitter*-nya. Ia menyebutkan bahwa pada tes tersebut, pegawai KPK diminta untuk memilih antara Al-Qur'an atau Pancasila.

"Pilih yang mana, Al-Qur'an atau Pancasila mengingatkan saya pada pertanyaan tes wawasan kebangsaan KPK," tulis akun Twitter, @febridiansyah , Selasa (1/6/2021).

Lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik atau Ombudsman RI sempat menyatakan bahwa pada proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ini terdapat adanya maladministrasi. Mulai dari rangkaian proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN hingga penetapan hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dianggap melawan hukum atau proses administrasi pelayanan publik sendiri.

Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), adanya TWK yang dilaksanakan untuk pegawai KPK ini dianggap sah dan konstitusional. Mahkamah Agung (MA) juga turut menyatakan bahwa TWK untuk calon PNS adalah sah dan konstitusional.

Dampak yang dirasakan oleh 57 pegawai KPK yang diberhentikan ini antara lain tidak mendapatkannya pesangon. *"Lima puluh tujuh pegawai KPK yang dipecat itu tanpa pesangon dan uang pensiun sama sekali. Tetapi SK pemecatan Ketua KPK ini berbunyi seakan mereka memberikan tunjangan, padahal itu adalah tabungan kita sendiri dalam bentuk tunjangan hari tua dan BPJS. Buruh pabrik pun masih dapat pesangon, tidak untuk 57!",* tulis Giri Suprapdiono, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK melalui akun *Twitter*-nya.

KPK sendiri membenarkan pernyataan mengenai pegawai KPK yang diberhentikan tidak akan mendapatkan pesangon dan juga uang pensiun. Tetapi, sebagai gantinya, 57 pegawai KPK yang diberhentikan ini akan mendapatkan Tunjangan Hari Tua (THT).

Setelah resmi diberhentikan, tidak sedikit yang melakukan alih profesi. Salah satunya, yaitu eks pegawai KPK, Juliandi Tigor Simanjuntak menceritakan bahwa ia harus beralih profesi sementara menjadi penjual nasi goreng. Terdapat juga pegawai eks KPK yang beralih kegiatan mulai dari bertani hingga mengurus pondok/pesantren. (Mrk/Ed: th)



No internet

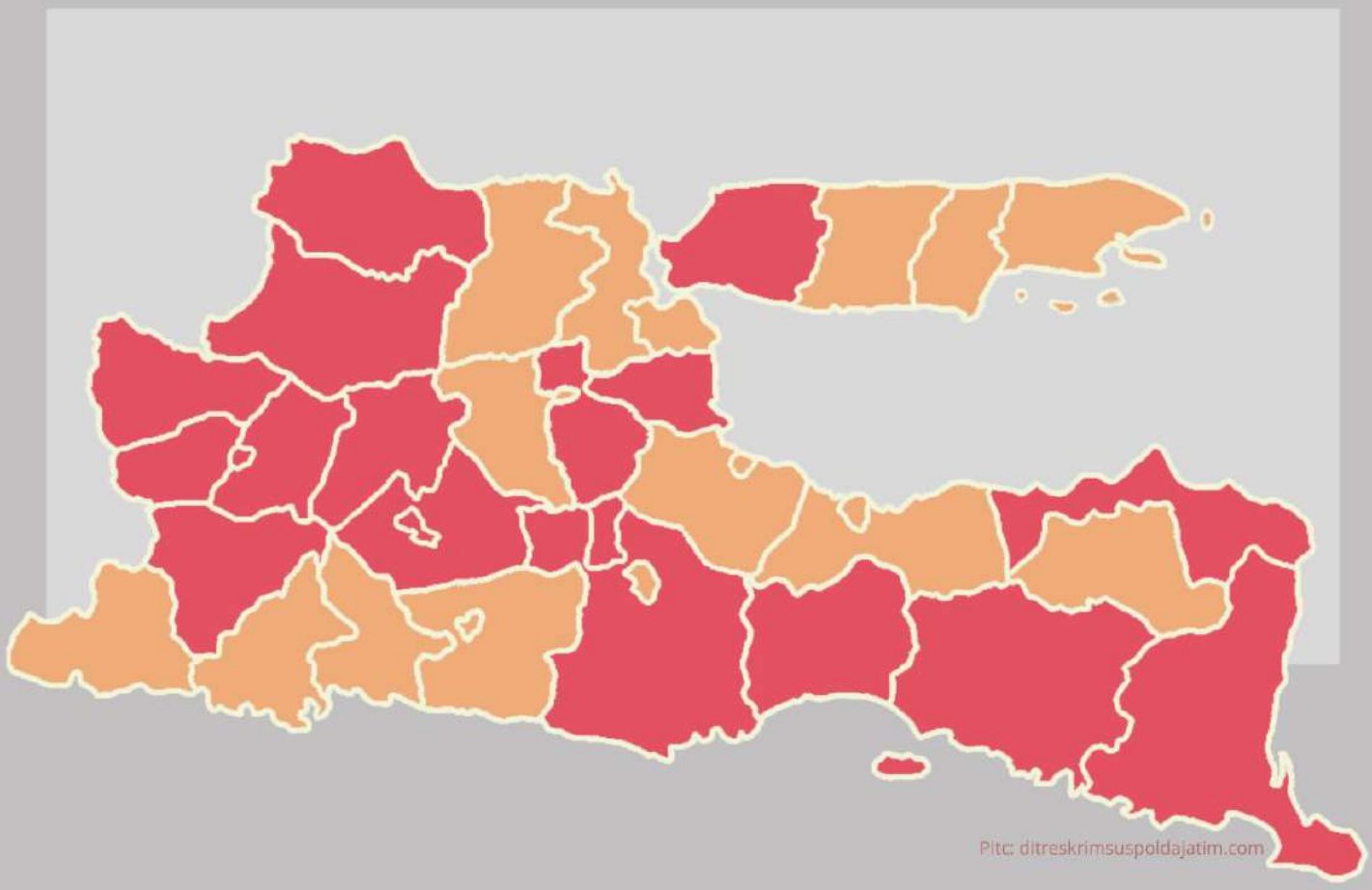
Try:

- Checking the network cables, modem, and router
- Reconnecting to Wi-Fi
- Running Windows Network Diagnostics

ERR_INTERNET_DISCONNECTED

Webinar BEM FIB Unair,

Merefleksikan Kemerdekaan Budaya Jawa Timur Masa Kini dan Dampaknya di Masa Pandemi



Selama 76 tahun merdeka, Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan tantangan kebudayaan. Mulai dari globalisasi, asimilasi, ketahanan kultural, serta pandemi saat ini yang menyebabkan penyelenggaraan kesenian terhenti. Dari permasalahan tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga (BEM FIB Unair) mengadakan Webinar yang bertajuk "Refleksi Hari Kemerdekaan : Peran Antar Elemen dalam Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur" pada Jumat, (20/8/2021).

Acara yang diselenggarakan melalui aplikasi teleconference Zoom dan live streaming YouTube ini dimoderatori oleh Hana Julia selaku Wakil Menteri Seni Budaya BEM FIB 2021.

Menghadirkan tiga pemateri dari tiga elemen berbeda, Yakni Emil Dardak, selakuWakil Gubernur Jawa Timur (Wagub Jatim), Purnawan Basundoro, selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB), dan Luhur Kayungga, selaku Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT).

Tantangan Kebudayaan Lokal dan Trendsetter

Sebagai elemen yang berada di lini pemerintahan, Emil Dardak menerangkan bahwa mewujudkan kepribadian dalam kebudayaan saat ini mengalami tantangan diantara nilai transnasional dan globalisasi. Maka dari itu, ia menginginkan Jawa Timur yang dapat mengombinasikan budaya leluhur dengan melihat perkembangan masa depan.

"Siapapun yang dapat membangun modern civilization kedepan maka dialah yang akan menjadi leader dalam trendsetter. Kita lihat Korea sekarang, Apa tidak kurang Korea mengikuti (budaya) barat, tetapi bisa menjadi leader."

Menanggapi budaya luar yang kian marak bukan berarti harus menutup diri, namun perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebagai respon, diperlukan adanya inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi sebagai upaya perlindungan kebudayaan Jawa Timur. Selanjutnya, memberikan ruang-ruang kepada seniman, budayawan dan praktisi untuk melakukan pengembangan budaya. Lalu dibutuhkan pemanfaatan khasanah kebudayaan untuk membangun karakter budaya sehingga dapat sejalan dengan kesejahteraan masyarakat.



Prof. Dr. Purnawan Basundoro
Basundoro, M.Hum.

Pitc: timesindonesia.co.id

Emil lalu memberikan contoh identitas lokal berupa kaus, ia mengatakan, akan sulit untuk menembus pasar negara lain.

"Bisnis konveksi kita kalau disuruh bersaing dengan Tiongkok pasti berat, karena ultra efficient mereka yang dapat memproduksi semua negara, namun jika kita punya selera yang costumize, tentunya kesempatan itu bisa kita menangkan persaingannya karena kita punya taste, cita rasa tersendiri", Ujarnya.

Terakhir, Emil menuturkan agar dapat membangun ikon budaya. Menurutnya, akan aneh jika mengambil bintang iklan artis luar negeri untuk pasar dalam negeri sendiri. Ia juga menambahkan bahwa perlunya kurasi terhadap talenta dan warisan budaya yang ada dengan melakukan pembinaan seperti pendidikan dan pelatihan.

Upaya Kebudayaan dalam Penanggulangan Pandemi

Menanggapi kondisi Jatim saat ini yang terkena dampak dari pandemi Covid-19, Purnawan Basundoro, sebagai pemateri kedua dan elemen dari akademisi menjelaskan bahwa pandemi berdampak besar pada kebudayaan karena penampilan kebudayaan dan seni harus terhenti. Namun disisi lain, juga perlu melakukan upaya penanggulangan pandemi dengan pendekatan budaya.

"Saat ini sebagian besar upaya dalam membendung penyebaran Covid-19 lebih banyak didekati pada pendekatan kekuasaan. Padahal kondisi di lapangan, perilaku masyarakat terkait dengan pandemi lebih banyak dipengaruhi dengan unsur kebudayaan. Nampaknya pendekatan kebudayaan belum banyak dilakukan oleh pemerintah."



Berkaitan dengan pokok pikiran di situasi pandemi, Purnawan menjelaskan bahwa perlu untuk melakukan pendekatan budaya. Pendekatan ini dapat mengubah perilaku dalam masyarakat. Seperti perilaku cangkruk yang menjadi potensi penyebarluasan virus, masyarakat yang masih tidak mau vaksinasi dan juga dari jajaran pemerintahan yang krisis keteladanan.

Terkait permasalahan tersebut, Ia memberikan usulan agar perlu melibatkan tokoh lokal setempat, pelibatan kelompok sosial, kelompok kebudayaan, kaum perempuan di level rumah tangga menjadi urgensi ditengah penanggulangan penyebaran Covid-19.

Selain itu, terdapat pokok pikiran lain yakni resiliensi praktik seni dan industri budaya. Pelaku kebudayaan tidak bisa menyelenggarakan kegiatan secara massal karena dapat menyebarkan virus.

"Oleh karena itu perlu dipikirkan strategi resiliensi yang berbasis pada pendekatan ilmu budaya dan dan ilmu kesehatan. Bagaimana caranya agar kebudayaan dan pelaku (kebudayaan) bisa menggelar aktivitasnya tanpa meninggalkan protokol kesehatan yang ketat." Ucap Purnawan.

Pelaku kebudayaan juga perlu memikirkan bentuk dan media baru sebagai alternatif untuk dapat mempertontonkan kesenian dan kebudayaan yang telah dikelola. Pelaku kebudayaan dapat memanfaatkan media daring, seperti salah satu kanal YouTube guyonan lokal dari Madura dan Jombang.

Kaitannya dengan peran FIB sebagai lembaga yang fokus di bidang budaya, Purnawan menerangkan, bahwa FIB adalah lembaga akademis yang melakukan program pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk mengakselerasi pengendalian pandemi berbasis kebudayaan dan implementasi amanat UU Pemajuan Kebudayaan. Tidak lupa juga, Ia menambahkan peran yang bisa dilakukan oleh Organisasi Mahasiswa (Ormawa) baik BEM maupun Badan Semi Otonom (BSO).

"BEM dan BSO alhamdullilah memiliki beberapa kegiatan yang basisnya kebudayaan di Jawa Timur. Tentu saja melalui berbagai praktik yang dilakukan dan berbagai eksperimen yang dilakukan oleh mahasiswa tentu saja adalah dalam rangka memajukan kebudayaan di Jawa Timur" Ujarnya.

Permasalahan Budaya yang Mikroskopis dan Tantangan Pelaku Kebudayaan

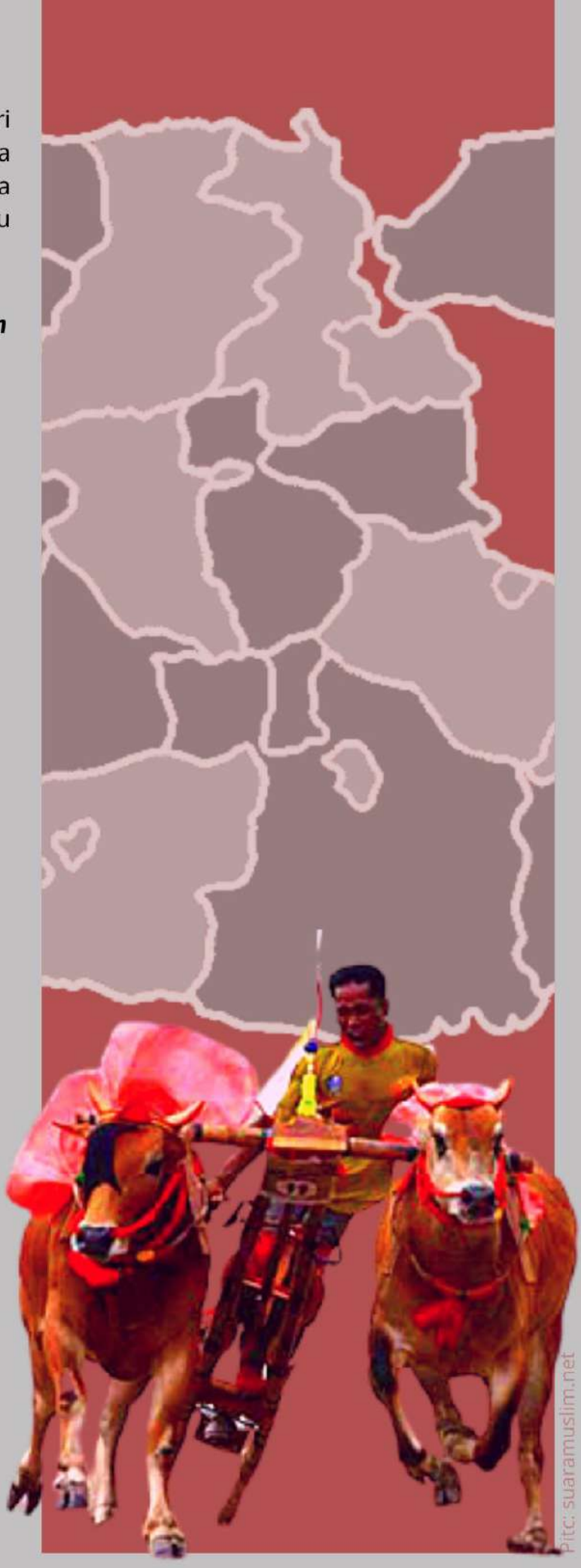
Luhur Kayungga, sebagai perwakilan dari elemen pelaku kebudayaan menanggapi kedua pembicara sebelumnya. Ia menganggap bahwa persoalan kebudayaan tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang yang besar saja.

"Melihat kebudayaan ibarat memakai teropong bintang yang dapat membuat kita terbatas dalam melihat realitas dan kedetailan. Barangkali kita memerlukan mikroskop untuk mendapatkan kedetailan-kedetailan."

Lalu Ia menjelaskan pengalaman ruang publik kebudayaan di masa kecilnya. Saat itu ruang publik mudah digunakan dalam penyelenggaraan kebudayaan karena menggunakan pekarangan dari seseorang. Namun ia mempertanyakan keberadaan ruang publik dengan kemudahan perizinan. Karena pada kondisi sekarang, menyelenggarakan kebudayaan dengan kemudahan tempat cukup rumit karena adanya prosedural yang harus melewati beberapa tahap.

Kendala lain yang juga ditemui ketika menyelenggarakan kebudayaan adalah kasus monopoli terhadap suatu ritual kebudayaan yang harus diubah sesuai ketentuan mereka. Selain itu, Luhur menggunakan contoh dari eksisnya Taman Hiburan Rakyat di Surabaya pada tahun 80-90 an hingga sekarang. Ia menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan kebudayaan terdapat politik dan bisnis di dalamnya sehingga persaingan tersebut dapat menggusur penyelenggaraan kebudayaan.

Sebagai penutup, Ia menginginkan agar pembahasan kebudayaan dapat diselesaikan bersama, baik oleh pelaku, akademisi, mahasiswa maupun pemerintah. Sebagai penutup, Ia menginginkan agar pembahasan kebudayaan dapat diselesaikan bersama, baik oleh pelaku, akademisi, mahasiswa maupun pemerintah. Sehingga pembahasan kebudayaan tidak berputar-putar pada pembahasan teoritis, melainkan juga kasuistik. (Af/Ed:WL)



Pitc: suaramuslim.net



Hati-Hati!

Gilang Bungkus Kembali Sasar Maba dari Penjara

Kasus pelecehan seksual fetish kain jarik yang sempat menghebohkan masyarakat tahun lalu, baru-baru ini mencuat kembali. Pelaku yang bernama lengkap Gilang Aprilian Nugraha Pratama dikabarkan aktif kembali di sosial media walaupun sudah dijatuhi hukuman pidana penjara.

Kamis, (2/9/21), media sosial twitter dihebohkan dengan unggahan dari akun yang bernama @mazzini_gsp. Mazzini menuliskan bahwa Gilang bungkus yang sudah divonis hukuman pidana penjara pada Bulan Maret lalu bersosial media lagi.

"Gilang Bungkus udah divonis 5 tahun, tapi kenapa Gilang Bungkus masih bisa main hp di dalam penjara terus komen-komen ke akun Maba minta follback? Ini orang sakit, masih cari korban terus dia " **tulis Mazzini melalui unggahannya.**

Akun Instagram dengan nama @geizanaprilian inilah yang diyakini sebagai akun baru dari Gilang. Dengan jumlah pengikut yang sudah mencapai 1.115 dan juga mempunyai 9 postingan, akun-akun terlihat seperti akun yang sering digunakan layaknya orang biasa, bukan seorang narapidana yang divonis bersalah.

Terlebih, akun tersebut juga terlihat aktif meninggalkan komentar seperti ***"Selamat, Dek. Follback, ya"*** dan juga ***"Follbacknya, Dek. Jangan sombong-sombong"*** pada postingan twibbon mahasiswa baru.



Pelaku pelecehan seksual fetish kain jarik, Gilang Bungkus atau Gilang Aprilian Nugraha Pratama diduga aktif bersosial media kembali di tempat tahanan. (CNN Indonesia/Farid)

Pitc: CNN Indonesia.com

Sampai saat tulisan ini ditulis, belum terkonfirmasi apakah akun yang sekarang sudah tidak bisa diakses itu merupakan akun asli dari Gilang atau hanya mengatasnamakan Gilang. Mazzini sendiri meyakinkan bahwa akun tersebut memanglah asli dimiliki Gilang.

Menurut akun Instagram @airlanggayuniperes melalui pesan pribadi, sudah terdapat 2 aduan dari Mahasiswa UNAIR yang mengalami kejadian serupa.

Menurutnya, dengan melihat perbandingan nama dari akun lama dan akun baru, kebiasaan mengunggah review film, dan juga komentar-komentar sejenis kepada mahasiswa baru ini menguatkan kecurigaannya bahwa Gilang memang aktif kembali di sosial media walaupun sedang dalam masa penahan di Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo.

Pihak Rutan sendiri langsung melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut. Dilansir dari CNN Indonesia, Kepala Rumah Tahanan Negara (Karutan) Kelas I Surabaya, Wahyu Hendrajati Setyo Nugroho, mengkonfirmasi bahwa Gilang memang menggunakan ponsel di tempat tahanan. Diduga ia meminjam ponsel tersebut dari tahanan lain untuk menghubungi keluarganya.



Di sisi lain, muncul dugaan adanya sewa ponsel di Rumah Tahanan Surabaya yang dilakukan oleh petugas setempat. Namun, Kepala Rutan, Hendra kembali menegaskan bahwa tidak ada yang namanya sewa ponsel. Ia juga tidak bisa mengkonfirmasi pemilik dari ponsel yang digunakan oleh Gilang. Walaupun begitu, pihaknya yakin sudah rutin melakukan razia di tempat tersebut



Pitc: LPMSitusFIB2021

Gilang Bungkus atau Gilang Aprilian Nugraha Pratama merupakan eks Mahasiswa Universitas Airlangga jurusan Sastra Indonesia yang sudah resmi di drop out (DO) sejak 5 Agustus 2020. Ia terbukti melakukan pelecehan seksual dengan cara membungkus korban menggunakan kain jarik sebagai dalih kebutuhan penelitian.

Menurut laporan dari BEM FIB Unair saat itu, korban Gilang mayoritas adalah mahasiswa Unair, terutama dari Fakultas Ilmu Budaya (FIB). Tetapi, terdapat pula laporan dari mahasiswa di luar kampus Unair.

Kasus yang ramai sejak Bulan Juli tahun 2020 ini mulai terkuak ketika salah satu korban menuliskan kesaksiannya di Twitter. Korban menyatakan bahwa dengan melalui chat WhatsApp, Gilang meminta bantuannya untuk menyelesaikan penelitian tugas akhir.

Korban diminta untuk mendokumentasi-kan dirinya sendiri ketika tubuhnya dililit dengan lakban lalu dibungkus dengan kain jarik. Dokumentasi tersebut pun diserahkan kepada Gilang dengan alasan sebagai kebutuhan penelitian mengenai reaksi yang dihasilkan oleh korban.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIB saat itu, yaitu Adnan Guntur menyatakan bahwa kelakuan Gilang yang melakukan pelecehan seksual dengan kain jarik itu memang sudah dibicarakan sejak lama. Gilang pun juga mengakui bahwa hal tersebut sudah dilakukannya sejak 2015. Menurut Mapolrestabes Surabaya, korban Gilang sudah mencapai 25 orang walaupun-

ada kemungkinan jumlah korban lebih dari itu.

Pada (3/3/2021), Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengumumkan bahwa Gilang dijatuhkan vonis hukuman pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan juga denda sejumlah Rp50 juta yang jika tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan.

Menurut keputusan hakim, Gilang terbukti melanggar tiga pasal, yaitu Pasal 45 ayat (4) juncto Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Lalu Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 juncto Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 289 KUHP.

Tindakan yang menjerat Gilang sampai ke jeruji besi ini dikenal sebagai fetish. Fetish merupakan tindakan ketika para pelaku memiliki kesenangan atau ketertarikan secara seksual terhadap benda mati ataupun benda-benda yang tidak dipandang sebagai sesuatu yang seksual secara umum.

Di zaman sekarang ini, terdapat banyak sekali modus fetish. Salah satunya, yaitu seperti yang dilakukan Gilang dengan modus membantu penelitian tugas akhirnya. Perlu diketahui, setiap penelitian yang diajukan oleh mahasiswa pasti mempunyai surat permohonan izin penelitian tersendiri, terutama skripsi atau tugas akhir.

Maka dari itu, pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan mengecek validitas surat permohonan izin tersebut. Lalu, cek kembali judul penelitian yang diajukan, apakah judul tersebut memang layak untuk diteliti atau mengarah ke fetish tertentu. (Mrk/Ed:CR)



Pitc: CNN Indonesia.com

Penipuan di Lingkup Kampus

Waspada! Aksi Penipuan Mengatasnamakan Pimpinan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Beredar di Kalangan Mahasiswa

Adanya masa pandemi, nyatanya tak menjadi penghalang besar bagi para penipu untuk melancarkan aksinya. Pasalnya, baru-baru ini beredar pesan teks penipuan yang dikirim kepada sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Airlangga dengan mengatasnamakan pimpinan fakultas. Menanggapi hal tersebut, pihak fakultas pun segera mengeluarkan pengumuman di laman web resmi maupun di akun resmi *Instagram* fakultas untuk mengantisipasi jatuhnya korban.

Aksi penipuan tersebut dilancarkan melalui SMS (*Short Message Service*) dengan modus yaitu mahasiswa yang dikirimi pesan ditunjuk pihak fakultas menjadi peserta seminar nasional bersama Dekan FIB Unair, Prof. Dr. Purnawan Basundoro di sebuah hotel di Surabaya.

Selanjutnya, mahasiswa tersebut diharuskan untuk menghubungi nomor yang tertera dan diarahkan melakukan pembayaran ke atm. Sejumlah mahasiswa yang mulai curiga bahwa hal tersebut adalah penipuan kemudian melakukan *cross check* kepada pihak fakultas.

“Kita mengetahui hal itu karena mendapat laporan dari mahasiswa yang mendapat SMS yang memberitahu untuk menghubungi wakil dekan dan dekan karena mereka terpilih untuk mengikuti seminar pelatihan” Terang Wakil Dekan 1 FIB Unair, Listoyono Santoso, SS., M.Hum pada Kamis (27/8).



“Ini modus, ada yang langsung bertanya kepada saya, ada yang bertanya kepada prodi, ada yang bertanya ke dosen. Akhirnya kemudian kita membuat pengumuman terkait hal tersebut” tambahnya.

Hingga saat ini, untungnya belum ada korban yang termakan pesan penipuan tersebut. Pihak fakultas mengklaim setidaknya terdapat 4 mahasiswa baik dari S1 maupun S2 yang melaporkan menerima pesan penipuan tersebut kepada pihak fakultas. Namun, yang menerima pesan tersebut bisa saja lebih banyak.

“Sampai sekarang kami belum mendapat laporan mahasiswa yang sudah menjadi korban. Tapi terdapat beberapa mahasiswa yang menanggapi dan meminta afirmasi, kemudian mereka digiring untuk ke atm dan sebagainya” Ungkap Listoyono Santoso, SS., M.Hum, Wakil Dekan 1 FIB Unair pada Kamis (27/8) lalu melalui *WhatsApp chat*.

“Akhirnya ada yang sudah sadar bahwa ini adalah penipuan dan untunglah mereka kritis melihat situasi ini” tambahnya.

Pelaku Penipuan Belum ditemukan

Sampai saat ini, pelaku kasus penipuan ini pun masih belum dapat dilacak. Wakil Dekan 1 mengatakan bahwa peristiwa seperti ini sudah ada sejak dahulu, bahkan bukan cuma di Fakultas Ilmu Budaya (FIB). Hanya saja pada saat ini mulai menyasar ke ranah mahasiswa.

Pihak fakultas juga mengatakan tidak dapat melakukan banyak hal selain memberikan pengumuman resmi dan meminta mahasiswa dan para dosen untuk lebih berhati-hati menanggapi berbagai modus penipuan seperti ini.

Mengungkap hal tersebut, menurut pihak fakultas setidaknya harus melibatkan pihak berwenang. Namun, pihak fakultas sendiri belum memiliki banyak data yang cukup untuk melaporkan kasus tersebut.

“Kita juga sulit melaporkan hal ini ke pihak berwenang. Selain karena belum ada korban dan semoga memang tidak ada korban” Ungkap Listoyono Santoso, SS., M.Hum pada Kamis (27/8).

Melalui wawancara virtual melalui *WhatsApp chat* beberapa hari yang lalu, Listiyono Santoso, SS., M.Hum, Dosen Filsafat yang juga menjabat sebagai Wakil Dekan 1 itu menuturkan sebuah pesan kepada mahasiswa dan dosen agar lebih cerdas menanggapi hal-hal semacam itu.

“Makanya saya menghimbau kepada mahasiswa kalau menerima SMS yang mengatasnamakan pimpinan tidak melalui surat resmi maka itu harus diwaspadai. Lebih baik cek dan recek kepada fakultas untuk mengetahui kebenaran informasi itu” Terangnya. (CR/Ed:WL)



No internet

Try:

- Checking the network cables, modem, and router
- Reconnecting to Wi-Fi
- Running Windows Network Diagnostics

ERR_INTERNET_DISCONNECTED

Semester Baru, Kurikulum Baru!



sumber: depositphotos.com

Perkuliahan semester baru akan dimulai pada tanggal 6 September 2021 mendatang. Sebelumnya, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga (FIB Unair) sendiri melaksanakan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) di laman cybercampus.unair.ac.id. Namun, adanya perubahan kurikulum mendadak membuat beberapa mahasiswa tidak siap dikarenakan tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak fakultas.

Perubahan kurikulum ini ternyata tidak hanya dilakukan pada Program Studi (prodi) yang ada di FIB saja, tetapi juga semua prodi di seluruh fakultas Unair. Desain ulang kurikulum sendiri dilakukan setelah adanya evaluasi terkait pembelajaran yang sudah ada yang dilakukan dalam jangka waktu 3-5 tahun. Hal ini dikarenakan masukan dari stakeholder terkait dengan kemampuan mahasiswa (lulusan) FIB ketika bekerja, dinamika perkembangan zaman yang menuntut perubahan serta metode pembelajaran juga menjadi pertimbangan untuk me-redesain kurikulum lama.

"Semuanya tidak ada yang mendadak, perubahan kurikulum didesain dengan proses yang matang", tutur Wakil Dekan (Wadek) 1 FIB Listiyono Santoso saat diwawancarai via Whatsapp (31/8). "Redesign kurikulum merupakan hal yang wajar dalam dari proses pembelajaran, sehingga tidak dilakukan mendadak", tambah beliau

Selain itu, kebijakan kemendikbud seperti kampus merdeka dan merdeka belajar juga menjadi faktor perubahan pada kurikulum lama. Kebijakan pembelajaran dasar bagi mahasiswa baru yang dimiliki Unair juga menjadi alasan mengapa kurikulum lama harus direnovasi.

“Dengan adanya konsep merdeka belajar serta redesain kurikulum, mahasiswa diharapkan mendapatkan pengalaman lebih banyak, baik di dalam dan luar kampus, selain itu capaian pembelajaran lulusan semakin dapat ditingkatkan sesuai pasar kerja melalui mata kuliah serta materi perkuliahan yang lebih up to date”, tegas beliau.

Dalam wawancara, Listiyono juga menjelaskan penyusunan kurikulum baru sendiri melibatkan tim pembentuk kurikulum yang dibentuk oleh setiap prodi yang bertugas mempersiapkan, merencanakan serta mengevaluasi kurikulum yang akan disusun.

Beliau juga menambahkan terkait peluncuran kurikulum yang dilakukan lebih cepat dari rencana. “Sebenarnya kurikulum ini berlaku mulai semester gasal tahun ajaran 2021/2022, hanya saja dikarenakan beberapa prodi yang melaksanakan kurikulum peralihan membuat perubahan struktur dalam kurikulum sehingga perubahan dilakukan lebih cepat dari seharusnya.”

Mahasiswa sendiri diharapkan merespon positif dan jangan berprasangka buruk terhadap kurikulum baru karena semua dilakukan demi pengembangan kemampuan mahasiswa setelah lulus nanti”. Beliau juga mengatakan bahwa perubahan kurikulum ini tidak boleh merugikan mahasiswa.

Terkait sosialisasi perubahan kurikulum, Wadek 1 FIB ini mengatakan bahwa hal ini dilakukan oleh setiap prodi, namun waktunya tidak memungkinkan. Oleh karena itu, sosialisasi seharusnya dilakukan pada saat bimbingan oleh dosen wali sebelum melaksanakan KRS.

Dosen Filsafat ini juga berpesan kepada mahasiswa terkait kurikulum baru, bahwa mahasiswa harus mampu beradaptasi dengan adanya perubahan kurikulum. Hal ini dikarenakan kurikulum baru akan memberikan pengalaman belajar yang lebih luas kepada mahasiswa seperti mengikuti mata kuliah di luar prodi. “Ayo kita songsong pembelajaran kedepan dengan menciptakan ekosistem yang kondusif di kampus agar iklim akademik berjalan dengan baik”, ajak beliau.

Terakhir, saat ditanyai wacana kuliah luring di FIB, Listiyono mengatakan bahwa hal tersebut belum dipastikan karena menunggu kebijakan serta informasi baru dari pemerintah. “Ini tidak bisa dipastikan, karena bagaimanapun harus ada kajian mendalam terkait pemberlakuan kuliah offline”. (th/Ed:WL)

DI MANA KATA MERDEKA BAGI PARA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL?

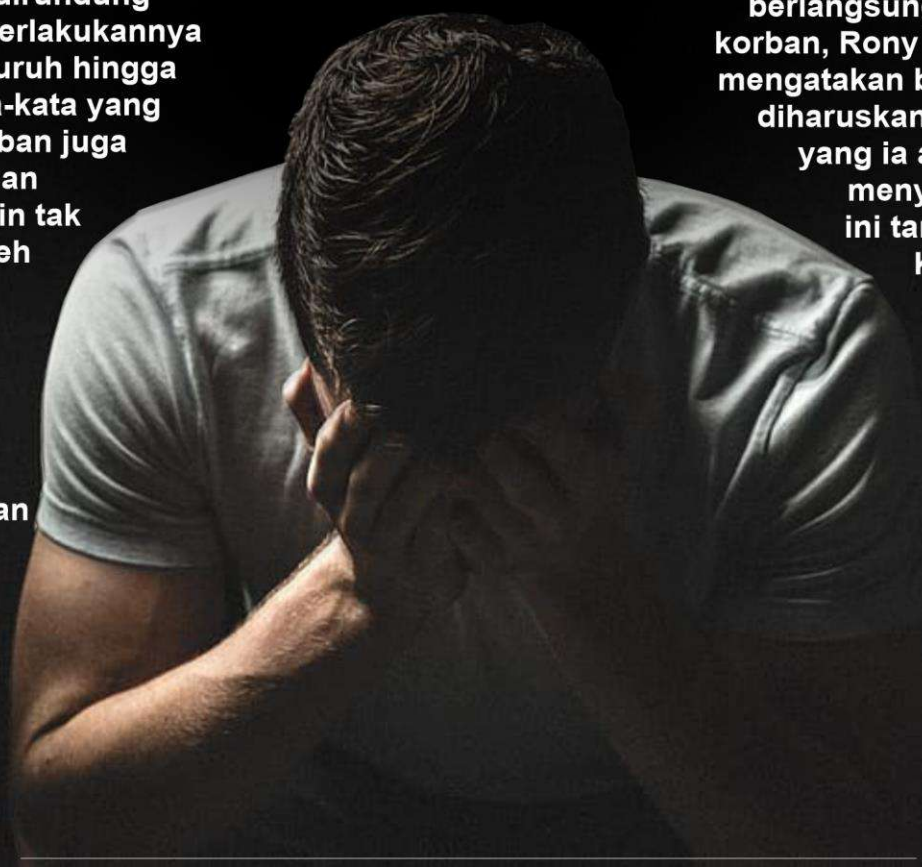
1 September 2021, media sosial *Twitter* dihebohkan dengan unggahan utas mengenai kasus pelecehan seksual yang dialami oleh seorang pekerja lelaki atau tepatnya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di bawah naungan Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Jakarta. Utas yang sampai saat ini mendapat 50.900 *retweet* dan 75.800 penyuka ini benar-benar menjadi pusat perhatian masyarakat. Pada utas tersebut, dilampirkan beberapa tangkapan layar yang berisikan tulisan dan diyakini sebagai rilis pers atau pernyataan korban yang selama ini mengalami perundungan hingga pelecehan seksual di lingkungan kerjanya sendiri.

Dari rilis pers tersebut, korban meyakinkan bahwa sudah dua tahun aksi perundungan dan pelecehan seksual tersebut dilakukan. Korban dirundung dengan cara memperlakukannya sebagai budak pesuruh hingga dimaki dengan kata-kata yang tidak senonoh. Korban juga mengalami pelecehan seksual yang tak lain tak bukan dilakukan oleh rekan kerjanya sendiri, korban menyatakan bahwa ia dilecehkan dengan cara alat kelaminnya yang dicoret sembarangan dan didokumentasi tanpa izin.

Lalu, apakah korban bersikap acuh dengan kejadian tersebut? Tentu saja tidak, setelah mencoba menghubungi Komnas HAM dengan membuat *e-mail* pengaduan pelecehan dan penindasan, pada tahun 2019, korban bertekad untuk membuat laporan kepolisian di Polsek Gambir. Tetapi, setelah datang pun, korban tidak mendapat solusi dan perlakuan yang semestinya. Bukannya langsung memproses laporan, petugas setempat yang dirasa berwenang tersebut malah menyarankan korban untuk melaporkan kepada atasan saja dan diselesaikan secara *internal* di kantor tempat kekerasan dan perundungan itu terjadi.

Apakah itu menjadi solusi terbaik? Tentu tidak, korban semakin dimaki dan dirundung lebih parah dibanding sebelumnya. Setahun setelahnya atau tepatnya pada tahun 2020, korban kembali membuat laporan kepolisian di Polsek yang sama, yaitu Polsek Gambir. Lagi-lagi, bukanlah jawaban dan solusi yang tepat untuk diterima korban, petugas pengayom masyarakat ini malah berkata *"Begini saja pak, mana nomor orang yang melecehkan bapak, biar saya telepon orangnya"* tulis korban pada rilis persnya.

Hingga sampai 14 Oktober 2021, proses hukum kasus ini masih berlangsung. Pengacara pihak korban, Rony Hutahaean bahkan mengatakan bahwa sang korban diharuskan mencabut laporan yang ia ajukan dan dituntut menyelesaikan masalah ini tanpa proses hukum. Korban diintimidasi harus melakukan proses damai jika tidak ingin dilaporkan atas pencemaran nama baik.





76 tahun Indonesia merdeka, terkecuali untuk para korban kekerasan seksual. Tindakan pelecehan dianggap gurauan belaka, laporan para korban juga terabaikan. Bagaikan kalah kuasa, korban tidak mendapatkan keadilan sedangkan para pelaku masih tersenyum bebas di luar sana.

Layaknya fenomena gunung es, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan bahwa per Juli 2020, jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia meningkat sebanyak 75%, tetapi hanya 29%-nya yang berhasil dilaporkan. Mulai dari takut akan persepsi masyarakat, tingkat kedudukan korban yang lebih lemah, hingga minimnya relasi pada lingkungan sendiri dibeberkan sebagai alasan korban enggan untuk melapor.

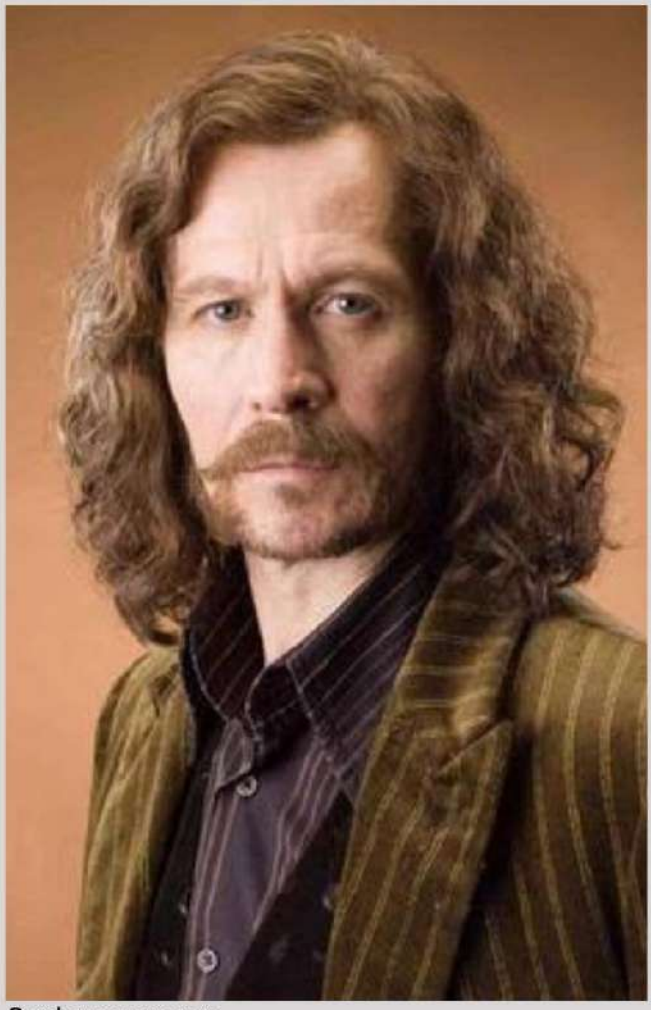
Sebagai upaya untuk memerdekakan para korban kekerasan seksual, masyarakat juga harus turut serta dalam mewujudkan hal tersebut. Dengan berani menghentikan kegiatan perundungan yang terjadi di lingkungan sekitar hingga memberikan dukungan emosional untuk korban juga sudah turut membantu dalam upaya memerdekakan korban kekerasan seksual.

Pembawa peran terbesar bagi upaya ini tidak lain tidak bukan adalah masyarakat sendiri. Tidaklah cukup bagi kita jika hanya mengandalkan petugas berwenang saja. Tidak harus menunggu sampai genap 100 tahun Indonesia merdeka, masyarakat sebagai pembawa perubahan haruslah bertindak lebih keras agar tuntutan merdeka para korban kekerasan seksual segera terwujud. Memang, jika bukan masyarakat, siapa lagi? (Mrk/Ed:th)

DI MANA KATA MERDEKA BAGI PARA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Belajar dari Sirius Black :

"Apa Sejatinya Hidup Bila Tanpa Risiko?"



Sumber : quora.com

Penggemar film Harry Potter pasti sudah tidak asing lagi mendengar nama Sirius Black. Sirius Black atau yang biasa dikenal dengan sebutan "Padfoot" ialah sahabat James Potter, yang tak lain merupakan suami Lily Potter sekaligus ayah kandung Harry Potter. Ia menjadi bapak wali Harry setelah kedua orang tuanya ditemukan meninggal karena dibunuh oleh Voldemort. Sirius Black juga merupakan salah satu dari sekian anggota Order Of Phoenix.

Menjadi seorang buronan tidak membuat dirinya gentar menghadapi kenyataan bahwa ia sedang menghadapi bahaya di berbagai tempat. Dunianya seolah menjadi sempit seketika dan kepercayaannya hanya pantas dipegang segelintir orang. Namun, meski menjadi buronan, ia tak sedikit pun takut untuk tetap menampakan diri di tempat umum. Sirius Black tetap dapat menunjukan eksistensinya dengan berbagai cara.

Seperti misalnya dalam film Harry Potter and The Goblet Of Fire, ketika nama Harry masuk cawan seleksi dan lolos menjadi kandidat Turnamen Triwizard, padahal pada kenyataannya umur Harry belum mencapai batasan usia minimal peserta. Sirius sukses mengirim surat kepada Harry tanpa diketahui oleh siapapun dengan menggunakan jasa burung hantu. Padahal saat itu kementrian sedang memperketat pengawasan lalu lintas burung hantu sejak berlangsungnya Piala Dunia Quidditch

Ia ingin berbicara secara tatap muka dengan Harry, dan menyuruh Harry untuk menemuinya di Ruang Rekreasi Gryffindor tepat pada pukul 01.00 pagi. Bukankah tindakan yang dilakukan Sirius bisa dibilang cukup gila? Di tengah keadaan dirinya yang masih dianggap sebagai buronan Azkaban, ia tetap ingin berbicara secara tatap muka dengan Harry. Alih-alih menulis semua yang ia ingin bicarakan di surat tersebut, ia malah menyuruh Harry untuk menemuinya di dalam Hogwarts.

Bukan hanya itu saja, ketika Alastor Mad-Eye Moody dan Nymphadora Tonks mengantarkan Harry ke stasiun, Sirius Black tanpa disadari ikut serta dalam perjalanan itu. Tentu tidak mungkin jika ia menampakan diri begitu saja di tempat umum. Ia berubah wujud menjadi hewan animagusnya, yakni seekor anjing hitam. Lalu menyelinap di sebuah ruangan untuk berbicara dengan Harry.

Alasan Sirius ikut dalam mengantar Harry ialah hanya ingin memberikan sebuah foto anggota awal Order Of Phoenix. Bila hanya memberikan foto, bukankah bisa saja ia menitipkan foto tersebut kepada Alastor Mad-Eye Moody atau Nymphadora Tonks? Mengapa harus repot-repot menyamar dan menyelinap seperti itu di tempat umum? Sepertinya hanya Sirius yang bisa menjawabnya.

Relevansi yang dapat ditarik dari kisah dengan kehidupan mahasiswa, bukankah seorang mahasiswa harus meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Sirius Black? Berani dalam mengambil sedikit resiko tidak akan membuat diri menjadi lebih kecil. Bukan hanya wajib berprestasi secara akademik, namun sejatinya seorang mahasiswa juga wajib menjadi simbol sebuah perjuangan dan perlawanan.**(DA/Ed: CR)**



"Melawan kebijakan-kebijakan yang melenceng, mendobrak gerakan baru dan memprotes ketidakadilan yang menindas, dan melawan ketidakbenaran yang meski pada akhirnya akan dicap sebagai oposisi dan dimusuhi berbagai golongan. Tapi, bukankah mahasiswa harus seperti itu? Karena – kembali mengutip kata-kata dari Sirius Black, "Apa sejatinya hidup bila tanpa resiko?". Sepertinya hanya diri kitalah yang dapat menjawabnya.

Sumber : wizardingworld.com

"Siapa Yang Ingin Jadi Polisi?"

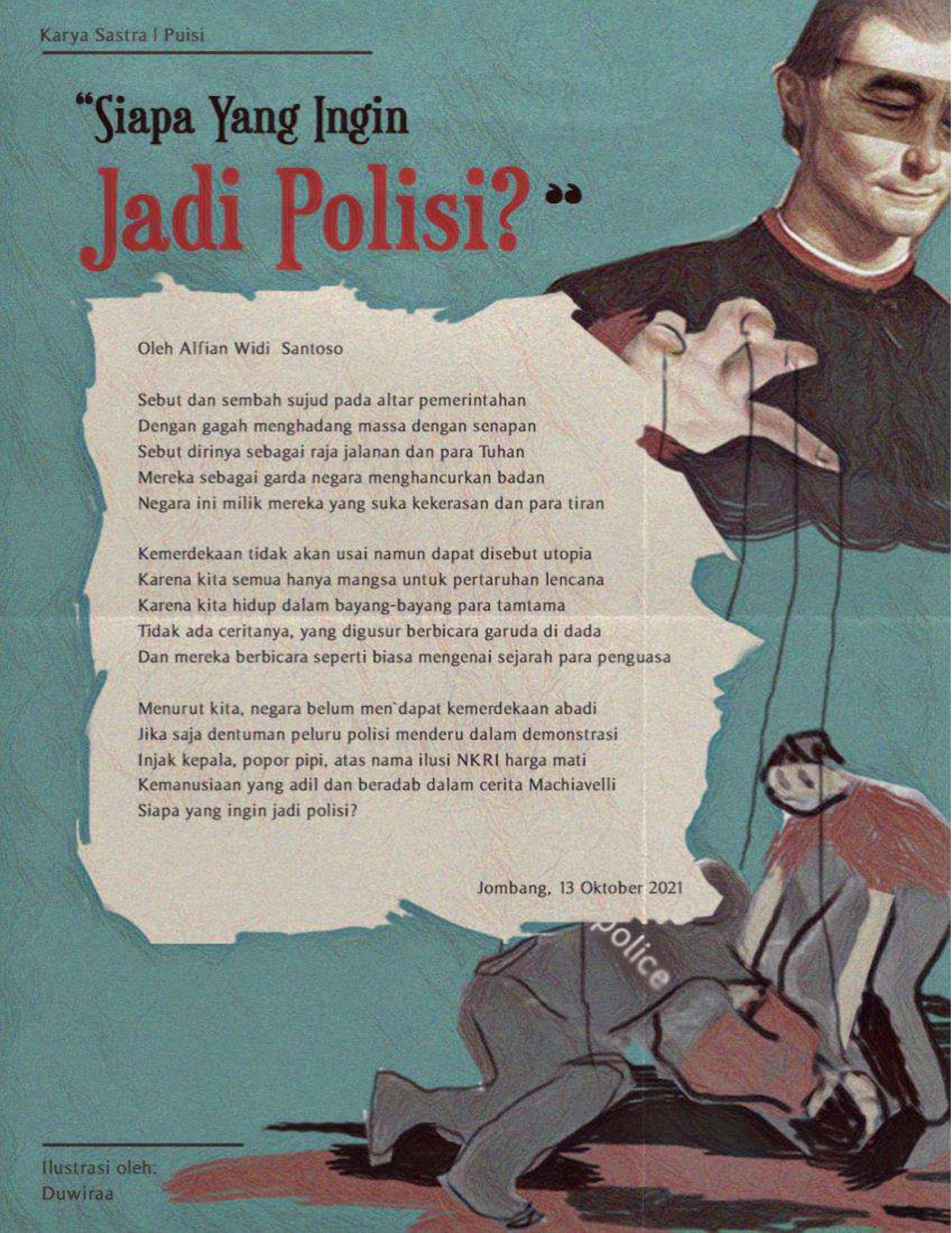
Oleh Alfian Widi Santoso

Sebut dan sembah sujud pada altar pemerintahan
Dengan gagah menghadang massa dengan senapan
Sebut dirinya sebagai raja jalanan dan para Tuhan
Mereka sebagai garda negara menghancurkan badan
Negara ini milik mereka yang suka kekerasan dan para tiran

Kemerdekaan tidak akan usai namun dapat disebut utopia
Karena kita semua hanya mangsa untuk pertaruhan lencana
Karena kita hidup dalam bayang-bayang para tamtama
Tidak ada ceritanya, yang digusur berbicara garuda di dada
Dan mereka berbicara seperti biasa mengenai sejarah para penguasa

Menurut kita, negara belum men`dapat kemerdekaan abadi
Jika saja dentuman peluru polisi menderu dalam demonstrasi
Injak kepala, popor pipi, atas nama ilusi NKRI harga mati
Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam cerita Machiavelli
Siapa yang ingin jadi polisi?

Jombang, 13 Oktober 2021



Ilustrasi oleh:
Duwiraa



Ilustrasi: Klikhukum.id

Hitam, Sengit Dengan Oligarki

olen: Ardino

Ingatkah kau dengan Hitam yang kelam?
Apa yang terjadi dengan arsip ketidakadilan saat itu?
Sungguh mengecewakan, sungguh sadis, dan tak bermarwah
Hanya memikirkan kemewahan, hilang sejahtera rakyat

Dalam Renenungan
Dalam hati yang terdalam
Yang tak tertahankan adalah kerelaan
Melihat betapa hancurnya negeriku
Jadi sanksi tak ada komitmen

Sungguh kelam dan memang benar hitam
Tumpukan Arsip hanya menunggu
Ketidakadilan sudah meresahkan masyarakat
Rentetan kasus HAM terbengkalai

Menyuguhkan dengan penyusutan dan kadaluarsa
Tahun Corona, tahun duka dan semayam,
Tenang di Alam nirwana meski keluarga, rakyat kecewa

September yang gelap dengan ketidakadilan dan ketidakpastian
Keterpurukan bangsa meski ada HAM tidak berarti serasa semua telah mati dan terbengkalai

Hak hak korban yang masih bertanda tanya
Unjuk rasa masyarakat
Melontarkan tuntutan
Batalkan undang undang
Pita suara yang dibayar lunas dengan gas air mata

Bukan mereka yang membawa mobil mewah serta pengamanan yang banyak
Namun mereka yang tanpa tentara yang mau melawan diktator

Cintaku padamu sangat tinggi indonesia
Tak henti aku mengingatkan pada mu
Bahwa penjilat olirgarki dipangkuan mu
Aku kecewa sabagai rakyat indonesia

BAGAIMANA PERJUANGAN BANGSA INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN?

Indonesia tidak semerta-merta langsung merdeka saat Presiden Soekarno dan Bung Hatta membacakan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus. Pemerintah Indonesia masih perlu perjuangan pasca kemerdekaan untuk membangun Indonesia benar-benar terbebas dari tangan penjajah sehingga menjadi negara merdeka yang sempurna. Lalu apa saja yg dilakukan pemerintah pasca kemerdekaan?

1 Mengesahkan UUD

Melalui sidang PPKI (Dokuritsu Junbi Inkai) pada tanggal 18 Agustus 1945 pemerintah Indonesia mulai bergerak cepat untuk menyempurnakan pemerintahan negara Indonesia yang baru satu hari berdiri dengan mengesahkan Undang-undang Dasar 1945 termasuk Pancasila yang tercantum dalam pembukaan. Selain itu pada tanggal ini juga menetapkan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai presiden dan wakil presiden.

2 Perjuangan Melawan Pemberontak

Sidang PPKI tanggal 19 Agustus membahas pembentukan kementerian baru Indonesia yang terdiri dari 12 kementrian dan juga pembagian wilayah Indonesia ke dalam 8 provinsi. Selain itu, dalam sidang 19 Agustus juga membentuk Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan pembantu presiden dalam menjalankan tugas.

3 Perubahan Sistem Pemerintahan

Pemerintahan republik Indonesia yang awalnya menganut sistem presidensial berubah menjadi parlementer pada 14 November 1945. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari internal KNIP.

4 Perjuangan Diplomatik

Sebagai negara yang baru merdeka, campur tangan pemerintah Belanda masih saja mengusik pemerintahan Indonesia. Oleh karenanya, para diplomatik Indonesia masih harus berjuang mempertahankan NKRI. Perjanjian-perjanjian pasca kemerdekaan dengan Negara masih terus diperjuangkan.

5 Perjuangan Melawan Pemberontak

Sistem pemerintahan yang dipilih pemerintah Indonesia pasca proklamasi tidak langsung diterima begitu saja bagi beberapa orang. Hal ini menimbulkan beberapa pemberontakan oleh beberapa kelompok orang akibat ketidakpuasan terhadap pilihan tersebut.



pemberontakan madiun



KMB



Sidang PKI 18-19 Agustus 1945



Rapat Kedua KNIP

Timeline

- Proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945
- Sidang PPKI Ke-2 18-19 Agustus 1945

*Pengesahan UUD
*Pembentukan Kementerian
*Pembagian Wilayah
*Pemebentukan KNIP

- Perubahan Sistem Pemerintahan 12 September s.d 14 November 1945
-Perjuangan Diplomatik

*Perjanjian Linggarjati
(15 November 1946 - 25 Maret 1947)
*Perjanjian Renville
(8 Desember 1947 - 17 Januari 1948)
*PEerjanjian Roem-Roijen
(14 April 1949 - 7 Mei 1949)
*KMB
(23 Agustus 1949 - 2 November 1949)

- Perjuangan Melawan Pemberontakan

*Pemberontakan di Madiun
18 September 1948
*Pemberontakan Kartosuwiryo
19 Desember 1948
*Peristiwa APRA
23 Januari 1950

Sumber Referensi:
Kompas Cyber Media. (2020, February 2). PPKI: Pembentukan, Tokoh, Sidang, Dan Tugasnya. KOMPAS.com. https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/02/180000369/ppki-pembentukan-tokoh-sidang-dan-tugasnya

Kompas Cyber Media. (2020, May 26). Kondisi Indonesia Pasca Proklamasi Kemerdekaan. KOMPAS.com. https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/26/140000569/kondisi-indonesia-pasca-proklamasi-kemerdekaan

Zoeken in Onderzoeken. (n.d.). Nationaal Archief. https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoeken?activeTab=photo_legacy&page=12&searchTerm=indonesia

Kolom Meme



Moch Zidane



Moch Fachri